**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Indonesia yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaats*). Pada negara yang menjunjung tinggi hukum memiliki tujuan hukum antara lain ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Sebagai negara hukum demokrasi peraturan perundang-undangan

dicitrakan dan menjawab semua permasalahan-permasalahan kebangsaan dengan kepentingan politis partai politik dan politisi di lembaga perwakilan.[[1]](#footnote-1)

Sebagai produk hukum perundang-undangan dianggap sebagai hal yang obyektif karena dibuat dalam proses dan teknis penyusunan yang taat asas hukum oleh lembaga perwakilan rakyat. Perundang-undangan didefinisikan sebagai Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Konstitusi memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Menurut Aristoteles, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan dan akhir dari setiap masyarakat. Konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa negara harus mengatur menurut aturan-aturan tersebut. Pendapat Aristoteles tersebut pada intinya konstitusi adalah dasar hukum dari segala hukum daripada penguasa. Sehingga konstitusi menjadi pondasi dasar suatu negara.[[2]](#footnote-2) Salah satu persoalan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih.

Disharmoni dan tumpeng tindih regulasi ini bukan hanya membuat pemerintah menjadi tidak dapat bergerak sigap dan responsif menghadapi problem dan tantangan yang muncul mengemuka, lebih jauh juga berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia.

Penyelesaian permasalahan regulasi di Indonesia yang tumpang tindih dan disharmonis, tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara harmonisasi. Tetapi harus dilakukan terobosan hukum menyelesaikan permasalahan tumpang tindih melalui konsep yang dikenal dengan *Omnibus Law*. Konsep ini juga dikenal dengan *omnibus bill* yang sering digunakan di Negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.

Citra idealitas perundangan masih jauh dari realitas, memberikan esensi kepastian hukum bagi masyarakat, peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali memberi ketidakpastian hukum, dampaknya banyak tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya.

Tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai UU menjadi persoalan yang menghambat investasi selama ini. Sehingga, UU *Omnibus Law* dinilai menjadi jalan keluar menyelesaikan persoalan tersebut.

Melihat hal itu, harmonisasi dibutuhkan untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan menerapkan konsep omnibus law yang berasal dalam tradisi hukum common law dimunculkan. Konsep mekanisme *omnibus law* menurut Usfunan perlunya penekanan perlunya *omnibus law* yang diatur dalam skema pembentukan Undang-undang.

Konsep penyederhanaan regulasi melalui *omnibus law* dilakukan dengan mencabut beberapa regulasi dan menyusunnya kembali dalam satu undang-undang secara menyeluruh, komprehensif, dan sederhana. Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimungkinkan perubahan substansi dan pencabutan undang-undang oleh undang-undang baru. Namun, pembaruan dan pencabutan undang-undang secara terintegrasi sebagaimana konsep *omnibus law* belum pernah dilakukan.[[3]](#footnote-3)

Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa *omnibus law* dapat dilakukan melalui kodifikasi hukum, baik terhadap undang-undang maupun berbagai peraturan pelaksana di tingkat pusat, sehingga untuk suatu bidang hukum dapat dibukukan dalam 1 naskah yang terpadu (Jimly Asshiddiqie, 2019).[[4]](#footnote-4)

Dari permasalahan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka pemerintah perlu mengambil suatu upaya terobosan hukum untuk membenahi konflik regulasi. Tuntutan perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satu gagasan *Omnibus Law* berkemungkinan untuk diterapkan di Indonesia asalkan diberikan ruang dan fondasi hukum. Adapun peraturan perundang-undang baru yang diinginkan adalah aplikatif dan menjawab kebutuhan akan harmonisasi dari beberapa peraturan perundang-undangan pada bidang tertentu dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam ilmu perundang-undangan, pembentukan hukum dalam hal ini hukum tertulis atau undang-undang, pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (di Indonesia atau pada umumnya di negara lain). Secara konsepsional Ilmu Perundang-undangan menurut Burkhardt Krems adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara Lebih lanjut Burkhardt Kremsmembagi Ilmu Perundang-undangan dalam tiga wilayah:[[5]](#footnote-5)

1. Proses Perundang-undangan;
2. Metode Perundang-undangan; dan
3. Teknik Perundang-undangan.

Adapun langkah-langkah pembentukan Perundang-undangan menurut Jazim Hamidi mengemukakan, susunan pembentukan Perundang-undangan terdiri dari:[[6]](#footnote-6)

1. Pengkajian (Interdisipliner)
2. Sudah mendesak untuk diatur undang-undang.
3. Kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan timbul di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Melakukan Penelitian
5. Penelitian hukum/hasil penelitian.
6. Hukum nasional/hukum negara lain yang mengatur materi yang bersangkutan.
7. Penyusunan naskah akademik.
8. Penyusunan rancangan undang-undang.
9. Penyusunan peraturan pemerintah dan seterusnya.

Dalam praktiknya, penyusunan peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan beberapa aspek meliputi:

1. Aspek materiil/substansial, berkenaan dengan masalah pengolahan isi dari suatu peraturan Perundang-undangan.
2. Aspek formal/prosedural, berhubungan dengan kegiatan pembentukan peraturan Perundang-undangan yang berlangsung dalam suatu negara tertentu.
3. Struktur Kaidah Hukum.
4. **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah **Bagaimanakah *omnibus law* solusi disharmonisasi dan penyederhana peraturan perundang-undangan di Indonesia**?

1. **Tujuan Khusus Penelitian**

Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk menghasilkan penelitian atas *omnibus law* sebagai solusi atas disharmonisasi dan penyederhanaan perundang-undangan di Indonesia yang selama ini tumpang tindih dan terpisah-pisah pengaturannya. Sangat penting melakukan penelitian tentang tahapan *omnibus law* dalam ilmu peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga akan menghasilkan tahapan *omnibus law* yang sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. **Urgensi Penelitian**

Urgensi dari penelitin ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum atas *omnibus law* sebagai solusi disharmonisasi dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta tahapannya dapat terjawab dari penelitian ini. Penelitian ini perlu segera dilakukan agar secara akademik dapat menjawab atas tumpang tindih regulasi di Indonesia.

1. **Output/Temuan**

Penelitian ini akan menghasilkan temuan, kajian ilmiah dalam formulasi harmonisasi dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian akan menghasilkan output tentang sistematika/tahapan *omnibus law* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. **Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan**

Kontribusi penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan tentang penyederhanaan regulasi di Indonesia atas peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih serta sistematisasi dalam proses tersebut. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan yang demikian, maka penelitian ini juga akan memperkaya publikasi ilmiah di bidang ilmu perundang-undangan, setidaknya dalam Prosiding I*nternational Conference* terindeks; atau artikel di jurnal nasional minimal SINTA 4 (DOI); dan artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila. Luaran tambahan dari penelitian ini direncanakan berupa satu artikel pada seminar nasional.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Definisi dan Ruang Lingkup *Omnibus Law***

Definisi daripada *Omnibus Law* dimulai dari kata *Omnibus*. Kata *Omnibus* berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A.Garner* disebutkan *omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once; inculding many thing or having varius purposes*, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata *Law* yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Jadi, konsep *omnibus law* merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja.

*Omnibus law* atau sering disebut juga *omnibus bill* adalah:

*“1. A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions. 2. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an ‘omnibus judgeship bill’ covering all proposals for new judgeships or an ‘omnibus crime bill’ dealing with different subjects such as new crimes and grams to states for crime control.”*

Pendapat serupa juga dinyatakan, bahwa *omnibus law* atau *omnibus bill*:

*“Just like a standard bill, omnibus bills are formal proposals to change laws that are voted on by rank and file lawmakers and sent off to the executive branch for final approval. The difference with omnibus bills is they contain numerous smaller bills, ostensibly on the same broad topic. Take the omnibus tax bill as an example: It may include changes on everything from income, corporate, and sales taxes, but all of those issues can fit under the large umbrella of taxes.*

Definisi Omnibus Law berasal dari kata omnibus dan law. Kata omnibus berasal dari bahasa Latin, omnis, yang berarti “untuk semuanya” atau “banyak”. Bila digandeng dengan kata law, yang berarti hukum, maka Omnibus Law dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.

Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* karya Bryan A Garner disebutkan: *“omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once; inculding many thing or having varius purposes”*, yang artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Jadi, konsep *Omnibus Law* merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja.

Jimly Asshiddiqie menyampaikan tiga keadaan untuk mempraktekkan *omnibus law*, yakni undang-undang yang akan diubah berkaitan secara langsung, undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan tetapi dalam praktek bersinggungan.

1. **Ruang Lingkup Ilmu Hukum Perundang-undangan**

Ilmu Perundang-undangan merupakan ilmu interdisipliner yang sangat berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi. Mempelajari Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan ini penting berdasarkan alasan praktis dan alasan teoretis yang meliputi:

1. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan pendidikan hukum terutama untuk latihan keterampilan bagi mahasiswa di bidang Ilmu Perundang-undangan, pendidikan klinik hukum, dan *legal drafting*.
2. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan tata cara perancangan dan pembentukan peraturan Perundang-undangandi tingkat pusat ataupun di tingkat daerah.

Mengacu pada pendapat Jujun S. Suriasumantri maka Perundang-undangan sebagai ilmu harus dapat menjawab beberapa pertanyaan, yakni:

1. Objek apa yang ditelaah? Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindera?
2. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar ditemukan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apakah kriterianya? Cara, teknik, atau sarana apa yang membantu dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu?
3. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional?[[7]](#footnote-7)

Hal yang sangat subtansi dalam ilmu perundang-undangan yaitu Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif; dan Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan Perundang-undangan, dan bersifat normatif. Ilmu Perundang-undangan ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Proses Perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*);
2. Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*);
3. Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*)

Menurut Maria Farida Indrati “perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan, apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat.” Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.

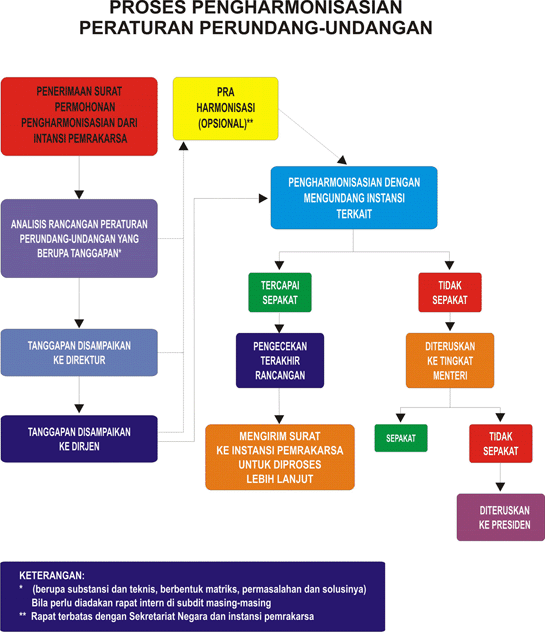
Mengacu pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan Undang-Undang dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pada tahap perencanaan, Prolegnas menjadi instrument perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Artinya, dalam pembentukan *omnibus law*, pembahasan Prolegnas menjadi langkah awal dengan merencanakan Undang-Undang yang akan disusun. Pasal 16 Undang-Undang P3 mensyaratkan program pembentukan Undang-Undang dengan memuat judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa pada prinsipnya ilmu pengetahuan perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan (peraturan) hukum oleh Negara yang bersifat multidisipliner. Yakni suatu ilmu pengetahuan yang dalam perkembangannya memerlukan bantuan dari ilmu pengetahuan lainnya.

Lebih lanjut Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan dapat dilihat dari tiga konsepsi, yaitu sebagai ilmu normatif murni, sebagai ilmu empirik murni dan sebagai kombinasi keduanya (normatif dan empirik) dengan titik beratnya pada tujuan praktisnya. Oleh karena itulah Van der Venden berpendapat, ilmu pengetahuan perundang-undangan ialah ilmu normatif (dilihat dari titik tolak teoritik ilmiah) dan juga empirik (dilihat dari titik tolak ilmu sosial).[[8]](#footnote-8)

Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan memsistematika proses dalam pembentukan perundang-undnagan di Indonesia seperti yang tertuang dalam bangan dibawah ini.[[9]](#footnote-9)

Bagan 1

Dari bagan harmonisasi peraturan perundang-undangan diatas dapat dilihat bahwa rumitnya administrasi yang harus ditempuh dan membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam proses teknis tersebut. Subtansi dari peraturan perundang-undangan yang akan di lakukan harmonisasi adalah hal yang sangat penting dalam proses ini.

1. **Peta *Ombibus Law* dibeberapa Negara**

Filipina sudah pernah menerapkan *omnibus law* di bidang investasi dengan menerbitkan *omnibus invest-ment code of 1987*. Melalui *omnibus investment code of 1987,* investor akan diberi sejumlah insentif dan hak-hak dasar yang menjamin usaha mereka di Filipina. Melihat bentuknya, *omnibus investment code of 1987* semacam kodifikasi di bidang investasi, sehingga segala hal terkait pengaturan investasi merujuk pada *omnibus investment code of 1987.*

*Omnibus law* di Amerika Serikat, Contohnya *The Omnibus Public Land Management Act of 2009*, dimana Undang-Undang ini menetapkan jutaan hektar lahan di Amerika Serikat sebagai kawasan lindung dan menetapkan sistem konservasi lanskap nasional. Pembentukan Undang-Undang ini diawali karena adanya keprihatinan terhadap perubahan iklim yang dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya air. Selain itu, Undang-Undang ini juga memiliki muatan *recovery act* yang diharapkan dapat menghasilkan investasi yang bermanfaat bagi perlindungan dan pemulihan ekosistem di Amerika Serikat. Mencermati *The Omnibus Public Land Management Act of 2009,* maka bentuknya adalah Undang-Undang yang muatannya lebih dari satu materi substantif yang sebelumnya terpisahkan dalam beberapa *act*/ Undang-Undang.

Salah satu Peraturan payung yang dibuat merupakan peraturan terbesar di Amerika yaitu peraturan *Transportation Equity Act for the* 21st *Century* (TEA-21) 6 adalah Undang-undang pengganti dari *Intermodal Surface Transportation Efficiency Act* (ISTEA). Hal-hal yang diatur dalam TEA-21 ini mengenai jalan raya federal, keamanan jalan raya, transit dan program transportasi lain. Didalam TEA-21 ini terdapat sekitar 9012 section yang terdiri 9 BAB.

Peraturan ini sudah konperhensif dalam mengatur terkait transportasi dan jalan raya di Amerika secara lengkap sehingga tidak bergantung dengan peraturan yang lainnya. Bentuk lain dari

*Omnibus Law* di Amerika juga terdapat dalam *Omnibus Trade and Competitiveness Act of* 1988 (OTCA). OTCA ini disusun dalam rangka untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan Amerika Serikat pada saat itu. OCTA tersusun atas 10 BAB, 44 Subbab, dan 10013 Pasal.

Undang-undang ini dilahirkan sebagai otoritas untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan timbal balik (Uruguay Round) melakukan revisi secara luas dari Undang-undang Perdagangan, penyesuaian bantuan, dorongan ekspor, harmonisasi tarif, kebijakan perdagangan internasional, perdagangan pertanian dan telekomunikasi, perdagangan teknologi internasional, kebijakan daya saing, investasi asing, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, pengadaan pemerintah, kebijakan paten, Sematech, dan defisit anggaran. Dengan adanya OTCA ini maka semua aturan tersebut di dalam satu payung.[[10]](#footnote-10)

Contoh lain penerapan *omnibus law* terdapat di Turki atau lebih populer disebut *torba kanun*. Ada hal yang menarik dari *torba kanun* ini karena dalam pembentukannya terdapat motif politik yakni pemerintah yang notabene oleh partai tunggal mengendalikan pengaturan agenda legislatif. Pemerintah secara sah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang paling mungkin disetujui oleh parlemen yang notabene didominasi oleh partai yang memerintah. Namun, secara ilegal pemerintah mencegah oposisi atau masyarakat yang meneliti RUU dengan cara menambahkan ketentuan baru dalam Rancangan Undang-Undang setelah dibacakan dalam rapat pleno. Di Turki sama dengan penerapan *omnibus law* di negara lain yakni untuk efisiensi waktu dalam pembahasan dan pengesahan Undang-Undang.[[11]](#footnote-11)

Di Australia, ada yang disebut dengan *Civil Law and Justice* (*Omnibus Amendments*) *Act* 2015. Undang-Undang ini membuat perubahan kecil terhadap undang-undang keadilan sipil dalam beberapa undang-undang yang telah ada. Undang-Undang omnibus

tersebut mengubah peraturan di dalam 16 undang-undang yang memiliki muatan yang berbeda.

*Civil Law and Justice* (*Omnibus Amendments*) *Act* 2015 adalah undang-undang omnibus yang terutama akan mengamandemen Undang-Undang Banding Administratif Tribunal 1975, Undang-Undang Kebangkrutan 1966, *Evidence Act* 1995, Pengadilan Sirkuit *Federal Australia Act* 1999, *Federal Court of Australia Act* 1976 dan Undang-Undang Arbitrase Internasional 1974.

Undang-Undang ini pelakukan perubahan kecil dan teknis untuk memberikan kejelasan lebih lanjut pada undang-undang untuk memperbaiki pengawasan legislatif dan mengubah ketentuan yang usang. Undang-Undang ini juga akan membuat sejumlah Perubahan konsekuensial. Efek gabungan dari perubahan ini akan meningkatkan efisiensi dan operasi sistem peradilan yang dikelola oleh portofolio Jaksa Agung.

*Omnibus law* lazim ditemui di negara dengan sistem presidensil, khususnya Amerika Serikat. Di dalam Kongres Amerika Serikat, *omnibus law* membantu membentuk konsensus legislatif karena setiap legislator dapat melampirkan Rancangan Undang-Undangnya kedalam *omnibus law*. Berbeda halnya dengan di Turki yang pada umumnya pemerintah menolak proposal oposisi di dalam *omnibus law* nya. Komplek-sitas konten yang terkandung dalam *omnibus law* membuat perhatian oposisi terbelah dalam memberikan kritik dan penentangan karena terlalu banyak masalah yang diperdebatkan dalam waktu yang terbatas. Kesamaan *omnibus law* di Turki dengan *omnibus law* pada umumnya hanya karena RUU disahkan dengan cepat dan hampir tanpa kegagalan.

1. ***Omnibus Law* di Indonesia**

Sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah melewati pelbagai rezim pemerintahan. Dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi. Perubahan dari zaman ke zaman, disertai pergantian presiden dan kabinet pemerintahan jelas mengakibatkan lahirnya banyak peraturan perundang-undangan sesuai dengan konteks persoalan dan tantangan saat itu. Sepanjang 74 tahun lebih usia kemerdekaan, jumlah produksi regulasi yang semakin banyak ini kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti disharmoni dan tumpah tindih regulasi.

Akibatnya lebih jauh, tak sedikit juga menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga lainnya, dan juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Disharmoni dan tumpeng tindih regulasi ini bukan hanya membuat pemerintah menjadi tidak dapat bergerak sigap dan responsif menghadapi problem dan tantangan yang muncul mengemuka, lebih jauh juga berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia.

Mengingat produksi regulasi, mulai dari tingkat undang-undang di sepanjang Indonesia merdeka telah menumpuk dan memunculkan fenomena “*hiper regulasi*”, maka setiap penyelenggara pemerintahan berniat melakukan inovasi atau terobosan bisa dipastikan bakal terjadi benturan dengan regulasi perundang-undangan. Sementara, jika revisi peraturan perundang-undangan itu hendak dilakukan secara konvensional, maka mudah diduga bakal membutuhkan waktu sangat lama untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan banyak regulasi yang ada.

Bersamaan dengan itu, tantangan era ekosistem masyarakat digital sudah menghadang didepan mata. Indonesia tidak boleh berlama-lama terbelit oleh prosedur formal. Sebuah terobosan kebijakan dalam proses penyusunan undang-undang haruslah segera dilahirkan. Berpijak dari urgensi inilah, maka jalan satu-satunya untuk menyederhanakan dan sekaligus menyeragamkan regulasi secara cepat ialah melalui skema Omnibus Law.

Lebih jauh dapat disimpulkan, bahwa *Omnibus Law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai semacam sebutlah itu "undang-undang payung hukum” (*umbrella act*). Dan ketika peraturan semacam payung hukum itu diundangkan maka konsekuensinya bakalan mencabut beberapa aturan tertentu di mana norma atau substansinya juga bukan tidak mungkin bakalan dinyatakan tidak berlaku, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Ada beberapa kelebihan penerapan konsep *Omnibus Law* dalam menyelesaikan sengketa regulasi di Indonesia, antara lain ialah:

1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien.
2. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
3. Memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. Mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
5. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu;
6. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

Banyak ulasan mengatakan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sejauh ini belum disusun dengan tujuan mengakomodasi keberadaan *Omnibus Law*. Namun mengingat penyusunan undang-undang merupakan produk kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR, jelas bukan mustahil skema *Omnibus Law* bakal diimplementasikan dalam proses legislasi ke depan.

Terlebih jika mengingat aspek urgensi dan signifikansi dari skema *Omnibus Law*. Bukan saja bertujuan mengharmonisasi dan mengakhiri tumpang tindih regulasi yang terjadi selama ini, skema *Omnibus Law* juga bakal sanggup mengdongkrak perbaikan kualitas regulasi di Indonesia sehingga diharapkan tercipta iklim pro investasi dan kemudahan izin berusaha.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis *socio legal* dengan cara mengevaluasi dan memetakan *Omnibus law* sebagai solusi atas disharmonisasi perundang-undangan di Indonesia. Setelah didapat bahan *omnibus law* perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Negara-negara didunia, kemudian dilakukan analisis menggunakan model harmonisasi dalam pembentukan pearuran perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. **Tahap-Tahap Penelitian**

Pada pelaksanaan penelitian meliputi dua tahap, yaitu tahap pertama pengumpulan bahan hukum ilmu perundang-undangan dan perancangan peraturan perundang-undangan; tahap kedua *Omnibus law* yang dilakukan oleh negara-negara didunia; dan tahap ketiga adalah tahapan dalam *Omnibus law* sebagai solusi atas disharmonisasi dan penyederhanaan atas peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.

1. **Pengumpulan dan Analisa Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan obyek penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan deskriptif, teknik yang digunakan adalah srudi dokumenter dengan menggunakan alat yang berupa bahan-bahan tertulis.

1. **Analisis Bahan Hukum/Data**

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui dua tahap. Pertama, dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku.[[12]](#footnote-12) Kemudian langkah kedua, dalam analisis bahan hukum digunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA).[[13]](#footnote-13)

Ragaan 1

Bagan Alir Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah kesinambungan dari keahlian peneliti dalam memberikan mata kuliah Ilmu Perundang-Undnagan dan matakuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan, berfungsi sebagai support dalam penelitian digambarkan pada ragaan 1 berikut ini.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**

Esensi prinsip negara hukum dan prinsip pemerintahan berdasar system konstitusi yang ditegaskan dalam UUD 1945, menghendaki adanya suatu sistem hukum, yakni setiap norma hukum harus terkait dan tersusun dalam suatu sistem, artinya norma hukum yang satu tidak boleh mengesampingka norma hukum yang lain. System hukum nasional merupakan hasil proses harmonisasi antara sejumlah unsur dan faktor tertentu baik intern domestik maupun ekstern internasional, yang diolah berdasarkan paradigma Pancasila dan UUD 1945.[[14]](#footnote-14)

Dalam kerangka sistem hukum nasional, semua pearturan perundangan-undangan dipandang sebagai satu sistem yang utuh. Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai kepastian hukum. Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan itu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya melainkan harus diciptakan, sehingga dapat terjadi tidak konsisten dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari segi penegakan hukum konstitusi dalam Tindakan dari lembaga kenegaraan sangat menentukan kadar kepastian hukum.

Salah satu sub sistem dari instrumen pembangunan nasional adalah di bidang hukum termasuk disini peraturan perundang-undangan. Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia belakangan ini menjadi isu yang sangat mengemuka. Terjadinya tumpang tindih dan peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah menjadi isu yang selalu diangkat dalam berbagai kesempatan.[[15]](#footnote-15)

Pada dasarnya semua aparatur penyelenggaraan negara sangat menyadari terjadinya hal tersebut, namun tindak lanjut untuk mengantisipasi permasalahan tersebut tidak pernah tuntas. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari kementerian/lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD-1945)sesungguhnya lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Adapun Arah kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Goesniadhie, 2006). Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia semakin lama menjadi semakin signifikan, ditengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks antara lain dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruh globalisasi. Di mana signifikansi yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan.

Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginyamasyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (subtansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam dua langkah yaitu penyesuaian sistem hukum nasional menjadi sistem hukum yang bersifat global dan dengan demikian yang harmonis adalah hukum positifnya (*harmony of law*) dan penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma yang bersifat global (Goesniadhie, 2006).

Di samping itu, perumusan langkah yang ideal dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu perlu melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam rangka sistem hukum nasional yang mencakup materi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture) (Friedman, 2001).

Sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan (Sumiarni, 2013).

Terkait dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas lex superiori derogat legi inferiori yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah itu harus disisihkan.

Dalam kajian ini pengertian sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis vertikal dan horisontal (Marzuki, 2013). Sinkronisasi yang akan dikaji adalah antara Pancasila dan UUD-1945 dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang terkait pengaturan peran serta masyarakat dalam pelibatan penentuan ganti kerugian akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Indonesia memang menjadi negara yang memiliki regulasi yang banyak. Bahkan angkanya pada 2017 sudah mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) aturan. Dalam hal ekonomi dan investasi, Pemerintah telah memetakan 74 (tujuh puluh empat) undang-undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi. Dari 74 (tujuh puluh empat) undang-undang tersebut, pemerintah akan menggodok 2 (dua) undang-undang besar, yakni RUU penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi di Indonesia. Masalahnya, apakah jumlah regulasi yang menjadi masalah atau ada hal lain, seperti regulasi yang disharmoni yang sejatinya menjadi masalah. Bila regulasi yang banyak menjadi masalah, maka penyederhanaan regulasi melalui konsep *omnibus law* tentu adalah langkah yang tepat. Sebab omnibus law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus.

Sebagai negara hukum demokrasi peraturan perundang-undangan dicitrakan dan menjawab semua permasalahan-permasalahan kebangsaan dengan kepentingan politis partai politik dan politisi di lembaga perwakilan. Sebagai produk hukum perundang-undangan dianggap sebagai hal yang obyektif karena dibuat dalam proses dan teknis penyusunan yang taat asas hukum oleh lembaga perwakilan rakyat. Perundang-undangan didefinisikan sebagai Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[[16]](#footnote-16)

Citra idealitas perundangan masih jauh dari realitas, memberikan esensi kepastian hukum bagi masyarakat, peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali memberi ketidakpastian hukum, dampaknya banyak tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya. Tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai UU menjadi persoalan yang menghambat investasi selama ini. Sehingga, Undang-Undang *Omnibus Law* dinilai menjadi jalan keluar menyelesaikan persoalan tersebut. Arahan Jokowi, pemerintah akan melakukan perbaikan pada setiap indikator yang menjadi prioritas. Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga harus segera menyelesaikan permasalahan dan peraturan yang mengganjal. Melihat hal itu, harmonisasi dibutuhkan untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan menerapkan konsep omnibus law yang berasal dalam tradisi hukum common law dimunculkan. Konsep mekanisme omnibus law menurut Usfunan perlunya penekanan perlunya omnibus law yang diatur dalam skema pembentukan Undang-undang.

Masalahnya tentu akan berbeda bila masalah regulasi tidak hanya dari segi jumlah, misalnya seperti adanya regulasi yang tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai, masalah ego sektoral pembentukan regulasi yang tidak terkendali, sampai masalah proses pembentukan yang tidak partisipatif sehingga regulasi yang lahir menerima penolakan dari masyarakat.Bila demikian, tentu untuk mengatasi masalah regulasi tidak cukup hanya sampai *omnibus law*. Sepintas, *omnibus law* memang baik untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak. Namun tanpa adanya upaya lain, masalah disharmoni, ego sektoral sampai masalah regulasi yang tidak partisipatif, tentu penerapan *omnibus law* pun tidak akan efektif. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini, penulis hendak mengulas bagaimana seharusnya konsep *omnibus law* diterapkan dalam upaya mereformasi regulasi ke arah yang lebih baik. Apakah omnibus law cukup atau tidak untuk melakukan reformasi regulasi.[[17]](#footnote-17)

Konsep *omnibus law* sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak, seperti yang dialami Indonesia saat ini. Sebagaimana yang diungkap Bappenas, sepanjang tahun 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi, dengan kementerian menjadi produsen terbanyak dengan 8.311 peraturan. Jenis regulasi terbanyak berikutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 2.446 peraturan. Sementara itu, produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh perda kabupaten/kota sebanyak 25.575 peraturan, disusul kemudian perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan.

Kemudian, merujuk pada data Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia, dari tahun 2014 sampai Oktober 2018, telah terbit 7.621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, 452 Peraturan Pemerintah, dan 107 Undang-Undang.

Selain jumlahnya yang terlalu banyak, regulasi tersebut juga tumpang tindih, sehingga untuk memperbaiki satu persoalan tidak cukup hanya dengan merevisi satu undang-undang saja. Misalnya bila terdapat masalah pengaturan soal kehutanan yang mengharuskan regulasinya diperbaiki, maka yang harus direvisi adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan dalam *beleid* lain, semisal Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Selain regulasi yang terlalu banyak, terdapat beberapa permasalahan mendasar lainnya, *pertama*, tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. *Kedua*, adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. *Ketiga*, ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan “*hiper-regulasi*”. *Keempat*, efektivitas peraturan perundang-undangan juga sering menjadi persoalan yang muncul pada saat implementasi.

Keadaan diperburuk dengan tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta ketiadaan lembaga khusus yang menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Dalam satu kesempatan Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, harus dicermati bentuk peraturan apa yang dapat dibuat, yang dilakukan melalui kajian dan penelitian terhadap pengendalian perdagangan strategis. Namun demikian, hal tersebut merupakan masalah yang menarik dan perlu dipikirkan bersama.[[18]](#footnote-18)

Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama juga menginformasikan beberapa rancangan peraturan perundang-undangan (Prolegnas 2010-2014) yang berkaitan dengan bahan-bahan strategis, antara lain, Rancangan Undang-Undang (RUU) Bahan Berbahaya, RUU Bahan Kimia, RUU Bioteknologi, RUU Komponen Pendukung Pertahanan Negara, RUU Lintas Batas Teknologi Antariksa, RUU Penggunaan Bahan Biologi, dan RUU Larangan Bahan Biologi sebagai Senjata, RUU Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan, serta RUU Senjata Api dan Bahan-Bahan Peledak, di samping yang masih dalam proses pembahasan, yaitu RUU Perdagangan.

Dalam kesempatan yang sama delegasi dari Amerika, Mr. Thomas Countryman menyatakan kemitraan yang akan dibangun dalam hal pembentukan peraturan tentang pengendalian perdagangan strategis dilakukan berdasarkan kepentingan bersama serta untuk keamanan dan kemakmuran ekonomi bagi Indonesia selain untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Amerika dan Indonesia, terdapat beberapa manfaat yang telah didapatkan negara mitra yang telah memiliki dan menerapkan pengaturan pengendalian perdagangan strategis, yaitu, dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi bagi kemakmuran negara mitra. Di samping itu, seiring Indonesia sebagai negara yang terus berkembang, dengan adanya pengaturan tentang pengendalian perdagangan strategis dapat memastikan keamanan investasi perusahaan-perusahaan baik di dalam dan di luar negeri. Meskipun memiliki metode dan system yang berbeda antara masing-masing negara mitra, namun kerja sama tetap diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Delegasi dari Amerika juga menyatakan siap menindaklanjuti proses pembuatan maupun penerapan peraturan pengendalian perdagangan strategis dengan mendatangkan ahli-ahli terbaik dari pihak Amerika dan Indonesia dan pembentukan peraturan tentang pengendalian perdagangan strategis ini diharapkan dapat dilakukan pada 2014.

Delegasi Amerika mengungkapkan rasa terima kasih atas kemitraan yang ada dan bersedia memberikan berbagai bentuk bantuan bagi Indonesia untuk memperlancar pembentukan peraturan tersebut.

Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, juga menyampaikan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya RUU atau dalam bentuk lain harus dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perdagangan strategis, perlu ada pendekatan dan pemahaman bersama dengan instansi-instansi terkait tentang pengertian perdagangan strategis, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, dan apakah peraturan lain yang mengatur tentang pengendalian perdagangan strategis sudah ada. Oleh karena itu, sebaiknya perlu dibuat kajian apabila memang peraturan tersebut diperlukan. Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian, pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang sudah ada dan yang belum dibuat, dan apabila memang dibutuhkan pengaturan, mana yang perlu dilakukan pengaturan.

Sementara itu dari Perwakilan dari Kementerian Perdagangan menyatakan saat ini Kementerian Perdagangan masih mempelajari negara-negara yang telah menerapkan peraturan tentang pengendalian perdagangan strategis, mengingat ada beberapa instansi yang terkait perdagangan barang strategis, perlu ada suatu kajian atau diskusi bersama, untuk membicarakan apa langkah selanjutnya yang dapat ditempuh dan mengevaluasi ketentuan perdagangan.

Direktorat Harmonisasi yang diwakili oleh bapak Waliyadin menyimpulkan dari diskusi yang berkembang tujuan yang ingin dicapai adalah masalah keamanan dan perdagangan, serta bagaimana semua itu dapat diwujudkan dalam satu peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu ada kesepakatan bersama sehingga dapat diambil langkah apa yang terbaik bagi Indonesia. Selain itu, perlu juga adanya satu pengertian tentang pengendalian perdagangan strategis, perlu didiskusikan juga apakah pemahaman tentang bahan strategis tersebut dinilai dari tingkat bahaya atau keuntungannya. Apabila dari segi bahaya, Indonesia sudah memiliki peraturan terkait tenaga nuklir baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah. Terkait masalah internasional Indonesia selalu menyesuaikan dengan peraturan internasional. Namun demikian, dipertanyakan apakah yang dimaksud pengertian pengendalian perdagangan strategis tersebut merupakan semacam glosarium, gabungan atau kesimpulan dari peraturan yang sudah ada, atau dalam bentuk lain.

Dalam hal materi muatan, pada dasarnya membentuk peraturan perundang-undangan adalah menuangkan kebijakan publik ke dalam bentuk norma hukum yang mengikat warga. Suatu kalimat norma dalam peraturan perundang-undangan dapat bersifat kewajiban atau keharusan, larangan, dan kebolehan.

Pembangunan materi hukum (legal substance) atau peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga kini terus berlangsung (*never ending process*) karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sendi utama dari sistem hukum nasional.Namun demikian masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek legal drafting-nya. Paling tidak adatiga permasalahan utama di bidang ini, yaitu: (i) tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan; (ii) perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas; dan (iii) implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. Permasalahan tersebut di atas, antara lain, disebabkanoleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi muatan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Oleh karena itu salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi harus dilakukan secara sistemik sejak dini yaitu sejak dilakukannya penyusunan naskah akademik (NA), penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sampai dengan penyusunan RUU, RPP dan Rancangan Perpres. Aspek perencanaan merupakan salah satu faktor penting, oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dimulai dari perencanaan. Disusun secara berencana, terpadu dansistematis, serta didukung oleh cara dan metode yang tepat, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3), UU RI Nomor 12 Tahun 2011 mengaturbahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan (Kemenkumham). Ketentuan ini mengandung konsekuensibahwa RUU, RPP dan Rancangan Perpres dalampengajuannya harus melewati mekanisme pengharmonisasian yangbiasanya dilakukan melalui pembahasan bersama Panitia Antar Kementerian (PAK) agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya.

Pengertian dari peraturan perundang-undangan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam kajian ini yang dikaji adalah pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pasal 7 UU RI Nomor 12 Tahun 2011mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
2. UUD-1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Peraturan Presiden;
7. Peraturan Daerah Provinsi; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian pengertian peraturan perundang-undangan menurut pakar adalah sebagai berikut:

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan- ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan status atau suatu tatanan.
3. peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkrit tertentu.
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiёle zin* atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift*.

Jadi unsur-unsur peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan yang bersifat umum-abstrak, tertulis, mengikat umum, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengatur (Indrawati, 2007). Nomenklatur “perundang-undangan” dapat didahului dengan kata lain, misalnya peraturan, sehingga menjadi “peraturan perundang-undangan” (Trijono, 2013).

Nomenklatur peraturan adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu, yang dibuat oleh pemerintah, yang salah satu bentuknya adalah undang-undang. Nomenklatur “aturan” dalam bahasa Arab disebut sebagai “kaidah” dan dalam bahasa Latin disebut dengan “norma”. Nomenklatur “peraturan perundang-undangan” mempunyai arti yang lebih fokus yakni aturan (kaidah, norma) yang dibuat oleh yang berkuasa melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur sesuatu. Peraturan perundang-undangan bersifat umum, abstrak dan terus-menerus. Hal ini berbeda dengan keputusan yang bersifat konkrit, individual, dan final (Trijono, 2013).

Unsur-unsur peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Peraturan tertulis;
2. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat Negara;
3. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
4. Mengikat secara umum.

Menurut Sri Hariningsih, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, pembentuk harus terlebih dulu mengetahui jenis peraturan perundang-undangan apa yang akan dibentuk. Berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menurut Bayu Dwi Anggono jenis peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui karena alasan sebagai berikut:

1. setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum yang jelas;
2. tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum, melainkan hanya yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya;
3. hanya peraturan yang masih berlaku yang boleh dijadikan dasar hukum;
4. peraturan yang akan dicabut tidak boleh dijadikan dasar hukum;
5. terdapat materi muatan tertentu untuk setiap jenis peraturan perundang-undangan yang berbeda satu sama lain antarjenis peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hanya satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditentukan secara konkret materi muatannya, yaitu undang-undang. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat UU PPP menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang mencakup:

1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sementara itu, materi muatan untuk jenis-jenis peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yakni Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (perpres) berisi materi untuk menjalankan atau yang diperintahkan oleh undang-undang.

Selain itu, materi muatan Perpres dapat pula untuk melaksanakan PP ataupun materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Pada prakteknya, banyak topik permasalahan yang sesungguhnya dapat diatur dengan satu produk peraturan perundang-undangan tetapi pada kenyataannya justru diatur dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam undang-undang pendidikan. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat pula undang-undang yang bersifat khusus dalam sektor pendidikan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.[[19]](#footnote-19)

Penyederhanaan regulasi secara hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum memasukkan konsep *Omnibus Law* sebagai salah satu asas dalam pembentukan undang-undang. Namun demikian, *omnibus law* bukanlah hal yang terlarang. Menilik benang merah historis, walaupun masih terdengar asing, namun bukanlah hal yang benar-benar baru. Meskipun bukan disebut sebagai *omnibus law*, kita pernah menerapkan konsep yang sama saat Majelis Permusyawaratan Rakyat menerbitkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Kemudian, konsep ini juga diterapkan dalam Undang-Undang Pemilu, walaupun bukan disebut sebagai omnibus law, namun konsep yang digunakan mirip. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada dasarnya menyatukan dan merevisi 6 (enam) undang-undang. Enam undang-undang yang disatukan dan direvisi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Menurut J. M. Sinclair, dalam Collins Cobuild Dictionary (1991)ditemukan kata harmonious dan harmonize dengan penjelasan sebagai berikut:

*A relationship, agreement etc. that is harmonious is friendly and peaceful. Things which are harmonious have parts which make up an attractive whole and which are in proper proportion to each other When people harmonize, they agree about issues or subjects in a friendly, peaceful ways; suitable, reconcile. If you harmonize two or morw things, they fit in with each other is part of a system, society etc* (Sinclair, 1991).

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi tersebut di atas, yakni:

1. adanya hal-hal yang bertentangan;
2. menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu sistem;
3. suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan; dan
4. kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Sedangkan yang dimaksud harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan (sistem hukum) yang harmonis. BPHN memberikan pengertian harmonisasi hukum, adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan,dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Rl.Gandhi, 1995 dalam “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif” menyatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningakatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum (Gandhi, 1995).

Harmonisasi peraturan perundang-undangan pasca amandemen UUD 1945, harmonisasi diatur dengan undang-undang Pasal 47 ayat (3) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi peraturan perundang-udangan mempunyai arti penting dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian integral atau sub sistem dalam sistem hukum suatu negara sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat saling terkait dan tergantung serta dapat membentuk suatu kebulatan yang utuh.

Di Indonesia sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam konstitusi yakni dalam Pasal 5 ayat (1) UUD-1945 yang menyatakan Presiden berhak mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 20 ayat (1) UUD-1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.Dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur mengenai sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki. Hierarki tersebut dapat ditemukan dalam beberapa rumusan Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 2, mengatur mengenai Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.
2. Pasal 3 ayat (1), mengatur mengenai UUD-1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Pasal 7 ayat (1), mengatur mengenai Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
4. UUD-1945;
5. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah;
7. Peraturan Presiden; dan
8. Peraturan Daerah.

Dengan ketentuan tersebut di atas terlihat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan Pembukaan UUD-1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang disusun tidak boleh bertentangan dengan nilai-niai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya UUD-1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan norma dasar bagi norma-norma hukum di bawahnya.

Jauh sebelumnya, *omnibus law* juga sudah dipraktekkan oleh Indonesia dalam menyederhanakan sekitar 7.000 peraturan peninggalan Belanda menjadi sekitar 400 peraturan. Namun demikian, upaya mereformasi regulasi tidak boleh terhenti sampai di *omnibus law*.

Masalah regulasi adalah masalah yang komplit. Pembenahan atau refomasi regulasi tidak cukup hanya diartikan sebagai penyatuan banyak undang-undang menjadi 1 (satu) undang-undang atau hanya dipandang sebagai pembaharuan hukum seperti merubah regulasi warisan kolonial dengan Undang-Undang yang baru, tapi harus dipandang sebagai pembenahan menyeluruh mulai dari pembentukan, harmonisasi dan evaluasi.M. Nur Sholikin mengemukakan 5 (lima) langkah agar *omnibus law* bisa efektif dan tidak disalahgunakan. Kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya, sebab omnibus law memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan menuntut pihak yang membuat menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepetingan terkait.
2. DPR dan pemerintah harus transparan dalam memberikan setiap informasi perkembangan proses perumusan UU sapu jagat ini.
3. Penyusun harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci.
4. Penyusun harus ketat melakukan harmonisasi baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat.
5. Penyusun harus melakukan preview sebelum disahkan, terutama dalam melakukan penilaian dampak yang akan timbul dari UU yang akan disahkan.

Penataan kembali peraturan perundang-undangan dan tata kelola di Indonesia bukan lagi hal periode selalu yang baru dilakukan, pada setiap pemerintahan reformasi regulasi dijadikan program pemerintah, penataan kembali tersebut dapat menggunakan metode transplantasi *omnibus law* dan *consolidation law* yang ada dalam tatanan metode ilmu perundang-undangan, dengan harapan penggunaan metode tersebut dapat menata kembali norma hukum yang telah diundangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Melalui kedua metode tersebut eskplorasi teks dan makna pembacaan ilmu hukum (interpretasi hukum) dalam pembangunan sistem hukum nasional dalam konteks ilmu pembacaan makna hukum atas keselarasan metode *omnibus law* dan *consolidation law* dimaknai sepanjang pembuatan peraturan perundang-undangan taat kepada tata hirarki dan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Glen S. Krutz, Hitching memberikan gambaran penerapan *omnibus law* ini dalam penyusunan regulasi, telah dipraktikkan sejak tahun 1970, lebih jelas diterangkan sebagai berikut: “*omnibus legislation has “proliferated” since the 1970*s”. meskipun di Indonesia penerapan metode *omnibus law* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini baru diterapkan secara khusus dalam teknik legislatif yang ruang lingkupnya merubah beberapa norma yang berada pada undang-undang yang telah diundangkan.

Metode omnibus law yang diterapkan dalam sistem hukum nasional telah disesuaikan melalui melaui beberapa pendekatan *pertama* dengan teori aliran dualisme hukum, *kedua* perundang-undangan dan keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Undang-Undang tentang Perubahan atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak diinterpretasikan legalistik formal, melainkan melalui pendekatan pembacaan hukum progresif yang teori transplantasi hukum, yang pada pokoknya menyelaraskan dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam beberapa literatur dapat disampaikan pengertian *omnibus law* sebagai berikut: “yaitu undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Praktik semacam ini tentu tidak lazim di dalam tradisi ‘*civil law*’ tetapi untuk seterusnya dipandang baik dan terus dipraktikkan sampai sekarang dengan sebutan sebagai “*omnibus Law*” atau UU Omnibus.”

Tim Perumus Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, pada pokoknya sebagai berikut: “*Omnibus law* merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang- Duhaimme mendefinisikan *Legal Dictionary* sebagai undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem pada pokoknya berikut:

*common law/anglo saxon seperti “A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience.”*

Jimly Asshiddiqie, 10 mendefinisikan pada pokoknya sebagai berikut:

“yaitu undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Praktik semacam ini tentu tidak lazim di dalam tradisi ‘*civil law*’ tetapi untuk seterusnya dipandang baik dan terus dipraktikkan sampai sekarang dengan sebutan sebagai “*omnibus Law*” atau UU Omnibus.”

Tim Perumus Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, pada pokoknya sebagai berikut:

“*Omnibus law* merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang- Duhaimme mendefinisikan Legal Dictionary sebagai undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem pada pokoknya berikut:

*common law/anglo saxon seperti “A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience*.”

Pemerintah saat ini sedang menyusun 2 (dua) paket penyederhanaan regulasi diantaranya Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang tentang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Penyusunan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang tersebut mengadopsi penerapan metode omnibus law, penting atau urgent untuk mendudukan, menggambarkan dan meletakan pembacaan arah elemen-elemen arsitektur penerapan metode omnibus law dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut.

Penerapan metode omnibus law bukan tanpa pertimbangan, penyederhanaan regulasi yang di fokuskan pada Kabinet Indonesia Maju selaras dengan ide dasar bahwa “penerapan *Omnibus Law* dapat mempercepat perekonomian,” Undang Nomor Pembentukan perubahan ekosistem Tatanan dalam Undang 12 Tahun 2011 tentang Peraturan PerundangUndangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketika dibaca melalui pendekatan penafsiran yang progresif pembacaan terhadap keselarasan metode *omnibus law* dengan undangundang pembentukan perundang-undangan dimaknai sebagai metode penyusunan, dengan tetap menggunakan kaidah-kaidah hukum pembentukan undang-undang.

Kaitan penerapan bangunan model arsitektur omnibus law dalam sistem hukum nasional melalui literasi yang telah dilakukan pemerintah, penerapannya pun dilakukan melalui kajian ratio logis pembuatan suatu undang-undang dengan metode omnibus law dengan pendekatan komparatif yang substantif, konstruktif dan transgresif, di Indonesia dan negara lain. Proses penerapan *omnibus law* dalam sistem hukum nasional pembentukan peraturan perundang-undangan memperhatikan pula asas pembentukan peraturan perundangundangan, di lain hal rancangan bangunan penerapan *omnibus law* dalam sistem hukum nasional.

Dalam mempercepat revitalisasi iklim regulasi yang terkait dengan iklim investasi dan peningkatan perekonomian melalui *Omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Perpajakan Pemerintah dan Rancangan Undang-Undang untuk Penguatan Perekonomian, memandang metode *omnibus law* dipertimbangkan untuk diterapkan dengan bersyarat yang telah transplantasi hukum.

Pembentukan perundang-undangan dipenuhi melalui proses rancangan peraturan dalam sistem hukum nasional, baik itu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, pembentukan peraturan perundang-undangan.

Melalui gambaran model arsitektur penerapan metode *omnibus law* tersebut, adopsi hukum melalui transplantasi sistem hukum *common law* ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum civil ketentuan yang telah ada dan tersebar dalam produkhukumyangtelahdiundangkanberbentuk undang-undang sebagai penyederhanaan pembentukan undang-undang pemerintah memandang perlu penggunaan metode *omnibus law* yaitu suatu metode untuk merubah beberapa ketentuan perundang-undangan yang sederajat dengan memperhatikan asas dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.[[20]](#footnote-20)

Permasalahan penataan regulasi di Indonesia, akan memakan waktu dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit bila proses penataan lembali peraturan perundang-undangan menggunakan metode amandemen suatu undang-undang, dalam tradisi baru di common law sistem, *omnibus law* mampu memberikan jawaban dengan pola penyusunan perundang-undangan yang bersifat substantif, konstruktif dan transgresif, dan cakupan materi muatan yang luas dari berapa undang-undang yang *existing* berlaku.

Pilihan untuk memformalkan *omnibus law* dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, merupakan pilihan ketika porses transplantasi hukum berbentuk teks undang-undang, meupakan pilihan yang otonom dapat saja diformalkan berbentuk aturan tertulis, akan tetapi dengan diformalkannya dalam suatu peraturan tertulis maka secara tidak langsung kemanfaatan hukum melalui pendekatan penafsiran terhadap teks hukum itu sendiri tidak bebas dan bersifat mutlak.

Hukum modern yang diterapkan di Indonesia (dan juga dibanyak negara lain) mempunyai pola dasar yang bersumber pada hukum Eropa tersebut. Konsep-konsep sistemnya prosedurnya banyak diambil dari situ. Dengan memahami konteks sosial, historis hukum Eropa tersebut tentunya kita akan lebih arif dan waspada tentang bagaimana kita akan memperlakukan. Pendekatan transplantasi sistem hukum terkait dengan metode *omnibus law* yang akan diterapkan dalam system hukum nasional untuk melakukan ammandemen.

Menggunakan *omnibus law* dipandang tidak diperlukan untuk diformalkan dalam aturan tertulis, melainkan metode *omnibus law* dapat langsung diterapkan dengan penyelarasan dengan peraturan pembentukan perundang-undangan melalui hubungan bekerjanya hukum.

Permasalahan sistem yang demikian itu mengisyaratkan, bahwa persoalah hukum yang kita hadapi sangat kompleks. Di satu sisi, hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuh norma dasar disebut *grund norm* atau *basic norm*. Hukum bergerak diantara dua dunia yang berbeda, baik dunia nilai maupun dunia sehari-hari (realitas sosial). Akibatnya sering terjadi ketegangan di saat hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang memengaruhi dari lingkungan sosialnya.[[21]](#footnote-21)

**Hiper Regulasi dan Tumpang Tindih**

Sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah melewati pelbagai rezim pemerintahan. Dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi. Perubahan dari zaman ke zaman, disertai pergantian presiden dan kabinet pemerintahan jelas mengakibatkan lahirnya banyak peraturan perundang-undangan sesuai dengan konteks persoalan dan tantangan saat itu. Sepanjang 74 tahun lebih usia kemerdekaan, jumlah produksi regulasi yang semakin banyak ini kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti disharmoni dan tumpah tindih regulasi.[[22]](#footnote-22)

Besarnya potensi ketidak harmonisan suatu peraturan perundang-undangan disebabkan karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah Prolegnas yang diajukan setiap tahunnya terus bertambah sedangkan Badan Legislasi (Baleg) dan Pemerintah telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas. Namun dalam perkembangannya kebutuhan hukum masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri.

Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping), hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan ( Setyadi, 2009). UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Harmonisasi Vertikal dalam hal asas *lex superiori delogat legi inferiori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga dalam penyusunannya pembentuk peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.

Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda.

Arti penting harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan ini adalah bahwa dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman (hak uji materil). (UU RI Nomor 5 Tahun 2004: Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 31 A) (Kementerian Sekretariat Negara, 2004a). Pasal 24 c UUD-1945 menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 24 A ayat (1) UUD-1945, menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) Huruf b UU RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dalam UU RI Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2) a,b dan c serta ayat (3) (Kementerian Sekretariat Negara, 2004).

Dengan aturan tersebut maka suatu undang-undang dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Konstitusi sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dimintakan *Judicial Review* atau pegujian yudisial kepada Mahkamah Agung jika di dalamnya terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi.

Terhadap undang-undang apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUD- 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap. Demikian juga peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal inilah harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting. Selain berfungsi membentuk peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan tergantung serta membentuk suatu kebulatan yang utuh, harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tindakan preventif guna mencegah terjadinya *Judicial Review* suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya proses harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan yang baik maka potensi berbagai kerugian dapat dicegah. Di samping harmonisasi vertikal tersebut di atas di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. b. Harmonisasi Horisontal berangkat dari asas *lex posterior delogat legi priori* yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialist delogat legi generalis* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Harmonisasi horisontal peraturan perundang-undangan yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektor dan tidak dapat berdiri sendiri.

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling terkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan utuh.Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini perlu berkoordinasi dengan insatansi yang terkait dengan substansi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Jika proses Harmoisasi horisontal peraturan perundang-undangan ini gagal dilaksanakan maka akan tercipta kondisi tumpang tindihnya antar sektor dan bidang hukum dalam sistem hukum suatu negara. Kondisi ini akan berdampak sangat masif karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapan peraturan perundang-undangan tesebut yang pada akhirnya tujuan hukum untuk mengabdi pada tujuan negara yakni menciptakankesejahteraan rakyat.

Harmonisasi horisontal peraturan perundang-undangantersebut dilakukan berdasarkan asas *Lex Posterior Delogat Legi Priori* terhadap suatu peraturan perudang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat dan dalam prakteknya diatur dalam ketentuan penutup pada suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan diatur status peraturan perundang-undangan yang sudah ada apakah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan tidak berlaku sama sekali (Tiarramon, 2009).

Akibatnya lebih jauh, tak sedikit juga menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga lainnya, dan juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Sialnya, disharmoni dan tumpeng tindih regulasi ini bukan hanya membuat pemerintah menjadi tidak dapat bergerak sigap dan responsif menghadapi problem dan tantangan yang muncul mengemuka, lebih jauh juga berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia.

Mengingat produksi regulasi, mulai dari tingkat undang-undang di sepanjang Indonesia merdeka telah menumpuk dan memunculkan fenomena “*hiper regulasi*”, maka setiap penyelenggara pemerintahan berniat melakukan inovasi atau terobosan bisa dipastikan bakal terjadi benturan dengan regulasi perundang-undangan. Sementara, jika revisi peraturan perundang-undangan itu hendak dilakukan secara konvensional, maka mudah diduga bakal membutuhkan waktu sangat lama untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan banyak regulasi yang ada.

Bersamaan dengan itu, tantangan era ekosistem masyarakat digital sudah menghadang di depan mata. Indonesia tidak boleh berlama-lama terbelit oleh prosedur formal. Sebuah terobosan kebijakan dalam proses penyusunan undang-undang haruslah segera dilahirkan. Berpijak dari urgensi inilah, maka jalan satu-satunya untuk menyederhanakan dan sekaligus menyeragamkan regulasi secara cepat ialah melalui skema *Omnibus Law*.

Definisi *Omnibus Law* berasal dari kata *omnibus* dan *law*. Kata *omnibus* berasal dari bahasa Latin, *omnis*, yang berarti “untuk semuanya” atau “banyak”. Bila digandeng dengan kata *law*, yang berarti hukum, maka *Omnibus Law* dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.

Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* karya Bryan A Garner disebutkan: *“omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once; inculding many thing or having varius purposes”*, yang artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Jadi, konsep *Omnibus Law* merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja.

Lebih jauh dapat disimpulkan, bahwa *Omnibus Law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai semacam sebutlah itu "undang-undang payung hukum” (*umbrella act*). Dan ketika peraturan semacam payung hukum itu diundangkan maka konsekuensinya bakalan mencabut beberapa aturan tertentu di mana norma atau substansinya juga bukan tidak mungkin bakalan dinyatakan tidak berlaku, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Ada beberapa kelebihan penerapan konsep *Omnibus Law* dalam menyelesaikan sengketa regulasi di Indonesia, antara lain ialah:

1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertical maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien.
2. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
3. Memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. Mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
5. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu;
6. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

Banyak ulasan mengatakan, UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sejauh ini belum disusun dengan tujuan mengakomodasi keberadaan *Omnibus Law*. Namun mengingat penyusunan undang-undang merupakan produk kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR, jelas bukan mustahil skema *Omnibus Law* bakal diimplementasikan dalam proses legislasi ke depan.

Terlebih jika mengingat aspek urgensi dan signifikansi dari skema *Omnibus Law*. Bukan saja bertujuan mengharmonisasi dan mengakhiri tumpang tindih regulasi yang terjadi selama ini, skema *Omnibus Law* juga bakal sanggup mengdongkrak perbaikan kualitas regulasi di Indonesia sehingga diharapkan tercipta iklim pro investasi dan kemudahan izin berusaha.

Dari Implementasi Simplikasi Regulasi, misalnya pada UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), hasil simplikasi dari sebelumnya terdapat 28 regulasi dikecilkan menjadi 13 regulasi. Kenapa Regulasi perlu disederhanakan karena masih banyaknya problematika pekerja migran Indonesia yang terhalang regulasi sehingga mereka menjadi  lambat dalam proses bekerja keluar negeri dan perlindungan hukum  bagi mereka.   
Misalnya proses Pengurusan Dokumen PMI jalurnya masih panjang dari tingkat desa, Disnaker, Dukcapil, Dinas Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kepolisian RI dan Kemkumham  Imigrasi. Kondisi tersebut berdampak munculnya kajian-kajian di dunia hukum untuk melakukan perampingan regulasi yang dikenal dengan Omnibus Law yang merupakan loncatan revolusi hukum.[[23]](#footnote-23)

"Untuk itu pemerintah sedang menyiapkan payung hukum dengan undang-undang konsolidasi sebagai fondament untuk menerbitkan Omnibus yang substansinya secara jelas dan tegas mengatur subyek norma-norma yang akan diharmonisasi. Omnibus Law sebagai undang-undang sapujagat yang digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa undang-undang", paparnya.

Kasubdit Produk Hukum Wilayah IV Dirjend Otda Kemendagri, mengatakan Regulasi yang tumpang tindih antara lain disebabkan masing-masing instansi  memiliki ego sektoral mengakibatkan lamanya proses perizinan dalam berinvestasin dan masalah masalah regulasi lainya. Oleh karenanya diperlukan simplikasi regulasi agar tidak terjadi regulasi yang tumpang tindih antar pemerintah pusat dan daerah untuk merugikan masyarakat.

Beberapa manfaat simplikasi berbiaya murah karena hanya perlu satu perda untuk mengatur beberapa urusan. Muatan materinya lengkap karena mengatur beberapa pelaksanaan urusan dalam satu Perda. Lebih praktis mudah di publikasikanmudah dipahami dan mudah dimengerti. Lebih terintegrasi dalam pelaksanaannya.    
Simplikasi dilakukan pada tahap pembentukan Perda, tahap harmonisasi di Biro Hukum atau di Badan Pembentukan Perda. Simpilkasi regulasi yang bermuatan materi yang hampir sama atau serumpun misalnya satu Peratuaran Daerah masalah Kehutanan, Pertanian dan Lingkungan Hidup. Satu Perda masalah Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan dan Olah Raga. Hal tersebut adalah salah satu contoh simplikasi regulasi yang tujuannya adalah untuk mempercepat proses  investasi dan urusan masyarakat.

"Tujuan dari Otonomi daerah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan mampu membuat daya saing. Secara aturan saat ini Menteri Dalam Negeri tidak berwenang membatalkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi. Gubernur tidak berwenang membatalkan Perda Kab/Kota.Pembatalan Perda menjadi wewenang Mahkamah Agung (MA), hal ini membuat apabila ada permasalahan menjadi berlarut-larut", terangnya.

"Oleh karenanya untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya kesalahan dalam simplikasi regulasi maka Kemendagri mengundang Kementerian/Lembaga dan instansi terkait dengan masing - masing substansi yang mereka miliki. Hal ini karena manfaat kebijakan deregulasi tersebut antara lain investasi dapat dengan mudah dijalankan di mana pada akhirnya kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utama"

Posisi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembentukan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), seolah tak mampu membendung besarnya keinginan pembentukan perundang-undangan yang diajukan oleh pemerintah maupun yang merupakan inisiatif DPR. Alhasil, fungsi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pun tak berjalan optimal. Masing-masing pihak memiliki argumen yang kuat dalam

mempertahankan suatu peraturan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas yang semestinya bisa menciptakan perencanaan dan arahan yang sistematis dalam program pembangunan hukum nasional, sekaligus menjadi pintu utama guna menyaring kebutuhan peraturan perundang-undangan yang menjadi aspirasi sekaligus kebutuhan hukum masyarakat, justru menjadikan factor ”kepentingan” sebagai tolak ukur pembentukan regulasi. Akibatnya Kondisi ini akan melahirkan situasi hukum yang serba multitafsir, konfliktual, dan tidak taat asas. Hal ini juga mengakibatkan lemahnya efektivitas implementasi regulasi yang pada ujungnya menciptakan tidak harmonisnya antara satu peraturan dan peraturan yang lain.[[24]](#footnote-24)

Tulisan ini bermaksud memberikan gagasan penataan-penataan regulasi dalam upaya menyederhanaan regulasi sebagai agenda reformasi hukum.

Simplifikasi Regulasi: Kendali Kuantitas

Upaya penataan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan simplifikasi regulasi yakni dengan cara menginventarisasi regulasi yang ada, mengidentifikasi masalah dan pemangku kepentingannya, melakukan evaluasi regulasi yang bermasalah, dan mencabut yang tidak perlu.

Berdasarkan jenis maka, pemilahan berkaitan dengan 3 (tiga) jenis regulasi yang bersifat (1) *Bleidsregel*/peraturan kebijakan, (2) *Beschikking*/keputusan pejabat tata usaha negara. (3) *Regeling*/peraturan menjadi titik pangkal simplifikasi regulasi hingga pada akhirnya di invetarisasi berdasarkan kategori substansi pengaturan.

Pemilahan-pemilahan yang dilakukan berdasarkan jenjang, jenis, dan substansi merupakan tahapan awal yang baik guna meninjau kekuatan (*strength*), kelemahan (*weekness*), peluang (*oportunity*), dan ancaman (thread).

Dalam sejarahnya, simplifikasi regulasi di Indonesia memang sudah dikehendaki khususnya setelah disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dekolonialisasi atas regulasi warisan penjajahan merupakan agenda pembangunan hukum nasional yang hingga masa reformasi belum sepenuhnya menemukan garis akhirnya (*finish line*). Beragam tantangan yang belum juga lenyap salah satunya adalah sakralisasi regulasi warisan penjajahan.

Misalnya, karena diasumsikan peraturan yang lama telah memberikan pengarahan, maka pembentukan baru menjadi parsial

sesuai kebutuhan, sedangkan induk peraturan lamanya belum dicabut.

Akibatnya, muncul dilema maupun egosentrisme kelembagaan akibat penafsiran yang parsial postur regulasi yang demikian itu. Fase dekolonialisasi yang tidak berketuntasan dan paranoid sebagaimana diuraikan diatas, akan berujung dengan kepada program legislasi yang TSM (tidak terstruktur dan tidak sistematis namun masif). Keadaan yang demikian itu jelas membawa postur regulasi yang obesitas sebagaimana yang saat ini sedang dihadapi.

Postur regulasi yang mengembos jelas akan menyulitkan penyelenggaraan negara hukum yang akan menghadapi agenda globalisasi. Sebagaimana diketahui bahwa memasuki abad 21, tatanan kehidupan umat manusia mengalami perubahan yang cepat karena terjadinya globalisasi.

Gejala yang ditandai oleh munculnya *non-state actor* dan keterkaitan yang kompleks antara isu-isu politik dan ekonomi dan perkembangan teknologi transportasi jelas telah melahirkan *era the end of geography*.

Dalam dunia yang seolah makin kecil dan tanpa batas tersebut, maka perubahan yang terjadi pada suatu bangsa atau negara akan mempengaruhi bangsa atau negara lain, dan muncul saling ketergantungan antar bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia. Makna terakhir atau *bottom line* globalisasi tidak lain adalah persaingan atau *competition* yang kadar dan intensitasnya benar-benar berkualitas internasional dan persaingan pada era global ini telah beralih dari persaingan di bidang politik ke persaingan di bidang ekonomi, karena kebijakan-kebijakan politik suatu negara makin lama makin terdesak oleh keinginan pasar global yang dimanifestasikan dalam organisasi global seperti WTO, serta munculnya regionalisasi kelompok-kelompok ekonomi baru di berbagai kawasan yang mengintegrasikan beberapa negara menjadi satu seperti NAFTA di Amerika Utara, APEC di kawasan Asia Pasifik, EU di Eropa dan AFTA di Asia Tenggara.

Pada kenyataannya beberapa negara di dunia ini sudah menjalankan dan menerapkan omnibus law, seperti di negara Amerika. Salah satu Peraturan payung yang dibuat merupakan peraturan terbesar di Amerika yaitu peraturan Transportation Equity Act for the 21st Century (TEA-21)6 adalah Undang – undang pengganti dari Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (ISTEA). Hal – hal yang diatur dalam TEA-21 ini mengenai jalan raya federal, keamanan jalan raya, transit dan program transportasi lain. Didalam TEA-21 ini terdapat sekitar 9012 section yang terdiri 9 BAB.

Peraturan ini sudah konperhensif dalam mengatur terkait transportasi dan jalan raya di Amerika secara lengkap sehingga tidak bergantung dengan peraturan yang lainnya. Bentuk lain dari Omnibus Law di Amerika juga terdapat dalam Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (OTCA). OTCA ini disusun dalam rangka untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan Amerika Serikat pada saat itu. OCTA tersusun atas 10 BAB, 44 Subbab, dan 10013 Pasal. Undang – undang ini dilahirkan sebagai otoritas untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan timbal balik (Uruguay Round) melakukan revisi secara luas dari Undang – undang Perdagangan, penyesuaian bantuan, dorongan ekspor, harmonisasi tarif, kebijakan perdagangan internasional, perdagangan pertanian dan telekomunikasi, perdagangan teknologi internasional, kebijakan daya saing, investasi asing, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, pengadaan pemerintah, kebijakan paten, Sematech, dan defisit anggaran. Dengan adanya OTCA ini maka semua aturan tersebut di dalam satu payung7 . Di Australia, ada yang disebut dengan Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015. Undang-Undang ini membuat perubahan kecil terhadap undang-undang keadilan sipil dalam beberapa undang-undang yang telah ada. Undang-Undang omnibus tersebut mengubah peraturan di dalam 16 undang-undang yang memiliki muatan yang berbeda. *Civil Law and Justice* (*Omnibus Amendments*) *Act* 2015 adalah undang-undang omnibus yang terutama akan mengamandemen Undang-Undang Banding Administratif Tribunal 1975, Undang-Undang Kebangkrutan 1966, Evidence Act 1995, Pengadilan Sirkuit Federal Australia Act 1999, Federal Court of Australia Act 1976 dan Undang-Undang Arbitrase Internasional 1974.8 Undang-Undang ini pelakukan perubahan kecil dan teknis untuk memberikan kejelasan lebih lanjut pada undangundang untuk memperbaiki pengawasan legislatif dan mengubah ketentuan yang usang. Undang-Undang ini juga akan membuat sejumlah Perubahan konsekuensial. Efek gabungan dari perubahan ini akan meningkatkan efisiensi dan operasi sistem peradilan yang dikelola oleh portofolio Jaksa Agung.

Di Indonesia, praktek *omnibus law* bisa dilihat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan jo UU Nomor 9 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Omnibus Law pernah ditetapkan pada level TAP MPR RI, yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

Implementasi Konseptual *omnibus law* yang seharusnya dalam tata hukum perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan *Omnibus* Law Asas -asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

A Hamid S Attamimi cenderung membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam asas formal dengan perincian asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas dapatnya dikenali, dan asas material dengan perincian asas sesuai dengan cita hukum Indonesia, asas sesuai dengan Hukum Dasar negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum, dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Undang-Undang adalah ketaatan asas hukum yang diatur secara hirarkis. Hal tersebut dapat dipahami dari teori jenjang hukum oleh Hans Nawiasky. Norma hukum dari suatu negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.

Susunan hirarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu asas yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis-jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep omnibus law belum diatur. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil konsep omnibus law bisa mengarah sebagai UU Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain.

Tetapi, Indonesia justru tidak menganut UU Payung karena posisi seluruh UU adalah sama sehingga secara teori peraturan perundang-undangan sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun jika tidak dimungkinkan melakukan perubahan UU No. 12 Tahun 2011 maka hanya melihat isi ketentuan di dalam omnibus law tersebut, apakah bersifat umum atau detail seperti UU biasa. Jika bersifat umum, maka tidak semua ketentuan yang dicabut melainkan hanya yang bertentangan saja.

Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi soal jika dibenturkan dengan asas *lex spesialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, karena dengan adanya *omnibus law*, maka secara otomatis peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep omnibus law. Sehingga jika *omnibus law* ingin diterapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia maka lazimnya berbentuk undang-undang, karena substansi undang-undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NRI 1945. Karena keadaan memaksa sebagai prasyarat perpu tidak bisa menjadi dasar legitimasi materi *omnibus law*.

Konsep hukum di Indonesia dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam UndangUndang No. 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundangundangan hanya menetapkan undang-undang sebagai yang tertinggi, tidak mengenal peraturan diatas undang-undang. Tetapi bila mengatur obyek peraturan yang sama saja, mungkin tidak persoalan karena tidak menyentuh obyek hukum lain. Omnibus Law dalam bentuk UU bukan UU Pokok, tetapi UU yang setara dengan UU lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.

**Penataan Kewenangan Peraturan *Omnibus Law***

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar dan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. NKRI dibagi atas Daerah Provinsi yang terdiri dari Kabupaten dan Kota. Pemda provinsi dan kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU.

Beberapa Prinsip dasar dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Urusan Pemerintahan adalah kewenangan Presiden dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/P).
2. Pemda adalah Kepala Daerah dan DPRD.
3. Presiden:

* menetapkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
* melakukan pembinaan dan pengawasan.
* memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan.

1. Pemerintah Pusat berwenang menetapkan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan daerah.

Dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali diperlukan perumusan-perumusan yang berhubungan dengan masalah pendelegasian kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan-peraturan yang lebih rendah. Pembentukan Peraturan perundangundangan dapat terjadi karena dua hal yaitu karena adnya kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi.

Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemberian atau penciptaan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu Lembaga negara atau Lembaga pemerintahan.

Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Kewenangan delegasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tindakan.

Berlainan dengan kewenangan atribusi, pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan melainkan diwakilkan dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada Dalam Praktik selama ini UU mendelegasikan langsung kewenangan kepada Menteri/Kepala Lembaga atau Pemda untuk melaksanakan UU dan pengaturan pelaksanaannya. Menteri/Kepala Lembaga atau Pemda mendapat kewenangan atribusi atau delegasi dari UU untuk menjalankan UU dan aturan pelaksanaannya sehingga terdapat banyak peraturan dan seringkali tidak sinkron satu sama lain.

NSPK sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Presiden atas pelaksanaan Pemerintahan belum lengkap dan standar serta belum mengacu kepada best practices. Fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum berjalan efektif karena keterbatasan anggaran dan aparat serta kurangnya pemahaman. Selama ini semua kementerian/lembaga mendapat kewenangan dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan.

Hal ini disebabkan karena tidak ada pembedaan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal lembaga. Dalam Pasal 8 ayat 1 UU 12 Tahun 2011 dirumuskan berbagai jenis peraturan yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan dari berbagai Lembaga negara dan pejabat yang berwenang. Jika rumusan tersebut dikaji berdasarkan fungsi dan kewenangan dari Lembaga atau pejabat yang dirumuskan di dalamnya menurut Maria Farida Indrati tidak semua Lembaga negara atau pejabat tersebut mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan yang bersifat umum dan berlaku keluar sebagai peraturan perundang-undangan.

Konsep omnibus law akan mengembalikan kewenangan pemerintahan dan pelaksanaan UU kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Pengaturan NSPK oleh Presiden akan mempertegas kewenangan dan sinkronisasi pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan UU standar dan menghapus ego sektoral. Pengaturan pelaksanaan UU dan NSPK ditetapkan oleh Presiden.

**BAB V**

**ANALISIS**

Banyaknya Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini mengakibatkan ketidakseragaman dalam mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indoneia. Tumpang tindih aturan merupakan ketidakefektifan dalam mengatur dan ketidakefesiansian waktu dan anggaran.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang sangat mendesak dalam membangun sistem yang harus diberlakukan disebuah negara dalam merespon globalisasi, contoh pada ruang investasi, jika aturan mengenai investasi tersebar dalam banyak dokumen pengaturan, bisa jadi aturan yang tersebar itu mengalami tumpang tindih dan pengaturan yang berbeda-beda atau tidak seragam.

*Omnibus law* menjadi solusi atas kesemrawutan pengaturan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Dalam proses omnibus law membutuhkan keseriusan seluruh penyelenggara yang berkaitan erat dengan rencana, penyusunan, pembahasan. Materi muatan *omnibus law* menjadi hal yang subtansi pada semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**

**KESIMPULAN**

Konsep penyederhanaan regulasi melalui *omnibus law* dilakukan dengan mencabut beberapa regulasi dan menyusunnya kembali dalam satu undang-undang secara menyeluruh, komprehensif, dan sederhana. Penyelesaian permasalahan regulasi di Indonesia yang tumpang tindih dan disharmonis, tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara harmonisasi. Tetapi harus dilakukan terobosan hukum menyelesaikan permasalahan tumpang tindih melalui konsep yang dikenal dengan *Omnibus Law*. Konsep ini juga dikenal dengan *omnibus bill* yang sering digunakan di Negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.

Sebuah terobosan kebijakan dalam proses penyusunan undang-undang haruslah segera dilahirkan. Berpijak dari urgensi inilah, maka jalan satu-satunya untuk menyederhanakan dan sekaligus menyeragamkan regulasi secara cepat ialah melalui skema Omnibus Law. Lebih jauh dapat disimpulkan, bahwa *Omnibus Law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai semacam sebutlah itu "undang-undang payung hukum” (*umbrella act*).

**Daftar Pustaka**

Agnes Fitryantika, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi III, Oktober-November 2019;

Ahmad Ulil Aedi dkk, *Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang (Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, Maret 2020;

Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 1 - Maret 2020;

D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama;

Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan,* Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017;

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000;

Kolin Kirkpatrick and David Parker, 2007, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing;

Kusnu Goesniadhie Slamet, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum, No.27 Vol 11 September 2004;

Rudy dkk, *Model Sosial Justice Assesment Dalam Pembentukan Peraturan di Daerah*, 2018, AURA, Bandar Lampung;

Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukanperaturan Perundang-Undangan*, Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan;

Sony Maulana Sikumbang dkk, *HKUM4403/Modul 1 Ilmu Perundang-Undangan*;

Sulasi Rongiyati, *Menata Regulasi Pemberdayaan Umkm Melalui Omnibus Law,* Bidang Hukum Kajian Singkat Atas Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No.23/I/Puslit/Desember/2019;

Yasushi Hasama dan Seref Iba, ‘*Legislative Agenda Setting by A Delegative Democracy: Omnibus Bills in Turkish Parliamentary System*’ (2017) 18 (2) Turkish Studies;

https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/struktur-djpp/dit-harmonisasi/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2461-pembahasan-dan-pertukaran-pengetahuan-tentang-pengendalian-perdagangan-strategis-antara-direktorat-jenderal-peraturan-perundang-undangan-dengan-perwakilan-delegasi-amerika-serikat.html>;

<https://www.tobokito.com/penyederhanaan-regulasi-hadirkan-aturan-aturan-ringkas-dan-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat>;

Ibnu Shina Chandranegara, *Menemukan Formulasi Diet Regulasi*, dalam https://www.researchgate.net/publication/320806944\_MENEMUKAN\_FORMULASI\_DIET\_REGULASI

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

1. Agnes Fitryantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi III, Oktober-November 2019, Hlm 301. [↑](#footnote-ref-1)
2. Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan,* Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, Hlm 230. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sulasi Rongiyati, *Menata Regulasi Pemberdayaan Umkm Melalui Omnibus Law,* Bidang Hukum Kajian Singkat Atas Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No.23/I/Puslit/Desember/2019, hlm 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, Hlm 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sony Maulana Sikumbang dkk, HKUM4403/Modul 1 Ilmu Perundang-Undangan, Hlm 1.1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid, Hlm 1.40 [↑](#footnote-ref-6)
7. Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal. 93 [↑](#footnote-ref-7)
8. Rudy dkk, *Model Sosial Justice Assesment Dalam Pembentukan Peraturan di Daerah*, 2018, AURA, Bandar Lampung, Hlm 10-11. [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses pada 10 Februari 2010 [↑](#footnote-ref-9)
10. Agnes Fitryantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi III, Oktober-November 2019, Hlm 304. [↑](#footnote-ref-10)
11. Yasushi Hasama dan Seref Iba, ‘*Legislative Agenda Setting by A Delegative Democracy: Omnibus Bills in Turkish Parliamentary System*’ (2017) 18 (2) Turkish Studies 316, 317. [↑](#footnote-ref-11)
12. D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kolin Kirkpatrick and David Parker, 2007, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kusnu Goesniadhie Slamet, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum, No.27 Vol 11 September 2004, Hlm 82 [↑](#footnote-ref-14)
15. Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukanperaturan Perundang-Undangan*, Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan, Hlm 2 [↑](#footnote-ref-15)
16. Agnes Fitriyantika, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi III, Oktober - November 2019, Hlm 301-302. [↑](#footnote-ref-16)
17. Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 1 - Maret 2020, hal 2. [↑](#footnote-ref-17)
18. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/struktur-djpp/dit-harmonisasi/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2461-pembahasan-dan-pertukaran-pengetahuan-tentang-pengendalian-perdagangan-strategis-antara-direktorat-jenderal-peraturan-perundang-undangan-dengan-perwakilan-delegasi-amerika-serikat.html [↑](#footnote-ref-18)
19. Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 1 - Maret 2020, hal 3-4. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahmad Ulil Aedi dkk, *Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang (Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, Maret 2020, Hlm 8-9. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid, Hlm 13 [↑](#footnote-ref-21)
22. https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum [↑](#footnote-ref-22)
23. https://www.tobokito.com/penyederhanaan-regulasi-hadirkan-aturan-aturan-ringkas-dan-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibnu Shina Chandranegara, *Menemukan Formulasi Diet Regulasi*, dalam https://www.researchgate.net/publication/320806944\_MENEMUKAN\_FORMULASI\_DIET\_REGULASI [↑](#footnote-ref-24)